

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan agar menjadi pertimbangan dan referensi bagi semua kalangan dalam keabsahan pengambilan keputusan dalam suatu keadaan perusahaan yang berstatus PKPU serta akibat hukum yang timbul atas pengambilan keputusan antara Debitur bersama Pengurus untuk pemberlakuan PHK terhadap pekerja. Serta hal-hal yang diperbolehkan dalam memberlakukan PHK menurut ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai tindakan perusahaan kepada Pekerja. Pendekatan yang digunakan menggunakan analisa linear kasus posisi mengenai PHK yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta terkait perolehan kompensasi dan keabsahan tindakan Debitur bersama Pengurus dalam alasan yang digunakan sebagai dasar pemberlakuan PHK dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Perusahaan yang diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil analisa menunjukkan bahwa tindakan Debitur bersama Pengurus tidak dapat dibenarkan dalam memberlakukan PHK dengan alasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berhubungan dengan perolehan Kompensasi sebagai Hak Pekerja dalam ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini berarti bahwa, PHK oleh Perusahaan dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : PHK, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak Pekerja.